

KEBIJAKAN FISKAL: ISLAM vs KAPITALISME STUDI KASUS DANA RP. 200 TRILIUN KEBIJAKAN MENTERI KEUANGAN INDONESIA TAHUN 2025

Yuana Tri Utomo
STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia
yuanautriutomo@gmail.com

Abstrak

Penelitian sederhana ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsep kebijakan fiskal antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalisme dengan studi kasus implementasi penggelontoran dana Rp. 200 triliun oleh Menteri Keuangan Indonesia tahun 2025. Peneliti menggunakan metode menelusuri informasi melalui kajian pustaka dari sumber-sumber yang valid, seperti dokumen laporan BPS (Badan Statistik Nasional), beberapa media massa, buku-buku referensi, dan beberapa jurnal yang memiliki reputasi. Setelah menganalisis informasi dihasilkan kesimpulan kualitatif dari penelitian ini, yaitu adanya perbedaan yang fundamental konsep kebijakan fiskal antara kapitalisme dan Islam, dan kebijakan menggelontorkan dana Rp. 200 triliun oleh Menteri Keuangan baru Indonesia tahun 2025 masih berparadigma kapitalisme.

Kata Kunci: Kebijakan fiskal, Ekonomi Islam, Kapitalisme, Menteri Keuangan

Abstract

This simple study aims to find out the difference in the concept of fiscal policy between the Islamic economic system and the capitalist economic system with a case study of the implementation of Rp. 200 trillion fund disbursement by the Minister of Finance of Indonesia in 2025. The researcher uses a method of searching information through a literature review from valid sources, such as BPS (National Statistics Agency) report documents, several mass media, reference books, and several reputable journals. After analyzing the information, a qualitative conclusion from this study was produced, namely that there is a fundamental difference in the concept of fiscal policy between capitalism and Islam, and the policy of disbursing Rp. 200 trillion by Indonesia's new Minister of Finance in 2025 is still a paradigm of capitalism.

Keywords: Fiscal policy, Islamic Economics, Capitalism, Minister of Finance

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia menjadi sorotan tajam sejak reshuffle kedua Kabinet Merah Putih tanggal 8 September lalu (<https://news.detik.com/berita/d-8101593/>). Pergantian menteri keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa disorot karena latar belakang keduanya memiliki keahlian yang sama di sektor fiskal, apakah memiliki dampak perubahan yang signifikan pada masa depan perekonomian masyarakat? Mengingat pengelolaan keuangan negara dengan kebijakan fiskal menjadi jantung dari arah pembangunan. Siapa pun yang duduk sebagai Menteri Keuangan akan berperan besar dalam menentukan nasib masyarakat, karena memiliki otoritas dalam memutuskan dari mana dana diperoleh, untuk apa dibelanjakan, dan bagaimana mengelola defisit (Danylyshyn & Bohdan, 2020; Khoirunnisa & Ghozali, 2018; Laster Pirtle, 2020; Santosa, 2021; Venkatesh & Hiremath, 2021).

Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) tahun 2020-2025 hadir menjadi Menteri Keuangan baru dengan sejumlah strategi yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, kebijakan-kebijakan awal yang ditempuhnya masih menempuh jalur yang sama dengan pendahulunya, yaitu bertumpu pada fiskal yang berbasis pada sistem kapitalisme, tidak terlalu jauh mengotak-atik atau bahkan meninggalkan pajak, utang, dan ketergantungan pada investasi asing. Strategi ini mungkin dianggap realistis dalam paradigma ekonomi kapitalisme, tetapi dalam pandangan Islam, terdapat problem mendasar yang justru melanggengkan krisis struktural (Alamsyah et al., 2022; Botoeva, 2018; Darmalaksana, 2022; Ghazanfar, 2003; Sandikci, 2011; Sandikci, 2018).

Penelitian sederhana ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai perbedaan konsep kebijakan fiskal antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalisme dengan studi kasus penggelontoran dana Rp. 200 triliun oleh Menteri Keuangan Indonesia tahun 2025. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi yang signifikan dalam menambah wacana dakwah ekonomi Islam, terutama di sektor makro bagi para pemikir, pembelajar, dan para pembaca secara umum.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menelusuri informasi melalui kajian pustaka dari sumber-sumber yang valid, seperti dokumen laporan BPS (Badan Statistik Nasional), beberapa media massa, buku-buku referensi, dan beberapa jurnal yang sudah memiliki reputasi. Adapun analisis yang digunakan untuk meracik informasi yang terkumpul adalah dengan analisis konten, melalui pembacaan yang berulang-ulang sampai jenuh sehingga beberapa informasi yang berdekatan dalam topiknya terkoneksi yang kemudian disajikan dalam subbab yang ada. Utomo (2025) dalam bukunya metodologi ekonomi Islam kontemporer menjelaskan adanya kebutuhan terhadap metodologi baru untuk mengkaji obyek-obyek kontemporer sebagaimana topik dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian

Pembangunan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang diambil oleh otoritas negara tersebut. Pembangunan dalam Islam tidak menggunakan kebijakan fiskal yang sama dengan Kapitalisme, ada perbedaan fundamental konsep kebijakan fiskal antara kapitalisme dan Islam. Kebijakan fiskal kapitalisme bertumpu pada pajak, utang, dan investasi terutama investasi asing dengan defisit anggaran yang berkelanjutan, akibatnya mengundang krisis yang siklik. Adapun kebijakan fiskal dalam Islam lebih menggunakan sistem ekonomi Islam. Islam dalam melakukan pembangunan negara lebih mengutamakan kepemilikan negara, seperti: *ghonimah*, *kharaj*, *jizyah*, dan sebagainya. Jika modal pembangunan masih kurang bisa mengambil dari keuntungan pengelolaan SDA yang ada, meskipun merupakan kepemilikan umum, namun dikembalikan untuk kemaslahatan publik dalam bentuk subsidi, infrastruktur, pendidikan, dan sebagainya.

Kebijakan menggelontorkan dana Rp. 200 triliun oleh Menteri Keuangan baru Indonesia tahun 2025, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa masih berparadigma kapitalisme karena pemerintah masih terjebak memihak pada sektor produksi atau sisi penawaran saja agar pertumbuhan meningkat, dan adanya kompromi dalam regulasi yang tidak memperhatikan obyek kebijakan tersebut, dalam hal ini adalah masyarakat secara luas. Skill memproduksi masyarakat perlu dilatih, diiringi dengan edukasi massif tentang kesadaran sistemik bersama dalam menghadapi kapitalisme menerapkan Islam.

Kebijakan Menteri Purbaya, Aroma Kapitalisme Semakin Kuat

Salah satu kebijakan Menteri Purbaya yang fenomenal adalah menggelontorkan dana yang sedang mengendap di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp. 200 triliun disalurkan ke masyarakat untuk alasan menjaga likuiditas dan menggerakkan sektor riil perekonomian. Dana Rp. 200 triliun yang nganggur di Bank Sentral Indonesia ini disalurkan melalui Bank Himbara (Himpunan Bank-Bank milik Negara), seperti: BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI kepada masyarakat dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Rakyat diberi modal usaha agar sektor produksi ekonomi atau sisi penawaran (*supply side*) menggeliat, padahal problem ekonomi sesungguhnya bukan hanya di *supply side* namun juga ada di *demand side* (sisi permintaan). Kebijakan ini dikritik oleh ekonom UGM, Denny Puspa Sari (2025), menurutnya kebijakan ini memang bisa memantik pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, namun bisa menyebabkan keseimbangan ekonomi terganggu. Naiknya angka likuiditas dan turunnya suku bunga bisa menyebabkan investor tidak tertarik menempatkan modalnya di Indonesia, akibatnya dana mereka berpotensi lari ke luar negeri, menyebabkan kurs rupiah terdepresiasi dan menjadi lemah terhadap mata uang asing (<https://ugm.ac.id/id/berita/menkeu-purbaya-siap-tarik-dana-200-triliun-dari-bi-ekonom-ugm-ingatkan-soal-risiko-depresiasi-rupiah/>). Kebijakan ini secara jangka pendek memang bisa menjaga “stabilitas fiskal”, tetapi membawa beban jangka panjang bagi rakyat Indonesia, terutama dalam hal kedaulatan ekonomi negara.

Kebijakan ini justru semakin menguatkan aroma kapitalisme di tubuh perekonomian Indonesia. Beberapa analisis mengenai kebijakan ini di antaranya adalah perhatian pemerintah (dalam hal ini adalah Menteri Keuangan) masih berkutat di sektor produksi dan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat pemerataan dan keadilan distribusi. Menggelontorkan dana menganggur melalui perbankan sesungguhnya sedang menjalankan mekanisme pasar produksi, terutama pasar keuangan (*finacial market* atau pasar modal). Akibatnya cadangan devisa khususnya dalam dolar akan pergi keluar negeri meninggalkan Indonesia. Hal ini sebetulnya dirasakan juga oleh Menteri Keuangan Purbaya sehingga mengeluarkan jurus menarik dollar WNI yang diluar negeri (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250922131515-8-669075/>). Memang bisa disinyalir merupakan bentuk nasionalisme perekonomian, bahkan beberapa ekonom menyampaikan sedang menjalankan Soemitronomics, merujuk kepada ajaran ekonomi ayah Presiden Prabowo.

Analisis yang lain mengenai kebijakan Menteri Purbaya ini adalah adanya unsur yang bisa dibaca sebagai “kompromi” antara kontrol negara dan mekanisme pasar. Aroma kapitalisme sangat kuat pada pemberdayaan bank (khususnya Bank Himbara) dalam penyaluran dana ke masyarakat yang juga mengandalkan mekanisme pasar finansial, akibatnya bisa diprediksi bahwa potensi keuntungan lebih besar dinikmati oleh pihak finansial atau perbankan daripada masyarakat secara langsung, meskipun cadangan dana di bank-bank tersebut pada faktanya masih aman. Pemerintah memberi rambu-rambu penyaluran dana tersebut dengan regulasi yang ketat, misalnya tidak boleh dibelikan Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), bahkan dana tersebut tidak akan ditarik kembali. Padahal penyaluran kredit yang bernuansa dipaksakan ini justru berpotensi menurunkan performa kredit itu sendiri, karena cadangan dana di Bank-Bank tersebut pada faktanya masih aman. Potensi menurunnya performa kredit itu misalnya dengan kredit macet, masyarakat tidak mampu memutar modalnya karena skill ekonominya rendah. Karena memang regulasi yang ada selama ini hanya memperhatikan dua pihak saja, pemerintah dan perbankan tanpa edukasi yang massif sistemik kepada masyarakat.

Sistem Ekonomi Islam Adalah Solusi

Islam memiliki ajaran yang sempurna karena datang dari Allah SWT, Sang Pencipta Alam Semesta. Ajaran Islam mengenai fiskal terdapat dalam sistem ekonomi (*an-nidzom al-iqtishody fi al-Islam*) yang berbeda secara fundamental dengan sistem ekonomi Kapitalisme. Negara Islam dalam melakukan pembangunan tidak bergantung pada pajak permanen ataupun utang ribawi, melainkan mengelola sumber-sumber halal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam (Arifudin et al., 2019; Fardiansyah & Utomo, 2023; Gultom & Tini, 2020; HS, 2018; Mahri, 2021; Ningrum et al., 2020; Suwandi et al., 2018; Syahputra, 2019; Utomo & Annisa Salsabila, 2017; Utomo & Baratullah, 2022). Misalnya harta kepemilikan negara yang diperoleh dari *ghanimah*, *jizyah*, *fai*, *kharraj*, dan sebagainya bisa dijadikan modal untuk pembangunan negara. Sistem fiskal yang berbasis dinar dan dirham mampu menjadikan likuiditas normal aman dari inflasi karena tidak mengandung bunga dimana bunga itu adalah *riba* dan *riba* itu hukumnya haram, sebagaimana firman Allah di QS. Al-Baqarah ayat 275.

Jika kepemilikan negara dirasa kurang karena berbagai alasan, misalnya karena negara baru berdiri, maka pembangunan yang dilakukan oleh negara bisa mengambil dari pengelolaan kepemilikan umum. Sumber Daya Alam (SDA) yang strategis seperti minyak, gas, emas, hutan, dan air dikelola negara, hasilnya dikembalikan kepada rakyat melalui layanan publik, subsidi, dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan negara dalam Islam pada hakekatnya bukan mengejar pertumbuhan sebagaimana kapitalisme, atau melakukan pemerataan sebagaimana pada sosialisme, melainkan melakukan distribusi yang adil dengan tetap memperhatikan *supply side* dan *demand side* meskipun bukan fokus. Fokus pembangunan negara dalam Islam diantaranya adalah menjalankan amanah ilahiyyah untuk mendistribusikan kekayaan yang adil di tengah-tengah umat manusia (QS. Al-Hasyr ayat 7). Islam mengatur agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, sehingga jurang kesenjangan sosial dapat diminimalkan.

Penutup

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya adalah cerminan keberlanjutan paradigma kapitalistik yang dalam jangka panjang bisa mengundang krisis kembali, bukan memberikan solusi. Kebijakan ini bukan jalan keluar, melainkan berpotensi menambah masalah. Sistem ekonomi Islam menghadirkan solusi menyeluruh sebagaimana terbukti secara historis dalam peradaban Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baitul mal sampai kelebihan harta karena distribusi berjalan adil dan sumber pendapatan negara begitu banyak. Tidak ada rakyat yang rela menerima zakat karena sudah sejahtera. Negara dalam Islam berdiri di atas sumber pendapatan yang halal, mengelola SDA untuk rakyat, menolak utang ribawi, dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Hanya dengan penerapan Islam kaffah, negeri ini bisa keluar dari jeratan kapitalisme dan benar-benar mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Wallaaahu a'lam.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, I. F., Omar, A., & Sarif, S. M. (2022). Towards Conceptualising Islamic Community-Based Enterprise : Examination of Some Underlying Principles. *Islamic Researc: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.47076/ir.v5i1.82>
- Arifudin, W. A., Fatihah, N., Echsan, A., Maftuhah, L., Nadjih, D., & Pandoman, A. (2019). Kesadaran Beragama Pelaku Pariwisata di Kawasan Malioboro. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(2), 117–132. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i2.559>
- Botoeva, A. (2018). *Islam and the Spirits of Capitalism : Competing Articulations of the Islamic Economy*. <https://doi.org/10.1177/0032329218776014>
- Danylyshyn, B., & Bohdan, I. (2020). Developing a system of anti-crisis measures for Ukraine's economy in the spread of the coronavirus pandemic. *Banks and Bank Systems*, 15(2), 1–15. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(2\).2020.01](https://doi.org/10.21511/bbs.15(2).2020.01)
- Darmalaksana, W. (2022). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(1), 1–13. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7342>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Ghazanfar, S. M. (2003). Medieval Islamic economic thought: Filling the great gap in European economics. In *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*. <https://doi.org/10.4324/9780203633700>
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>
- HS, S. (2018). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: Kajian Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 119. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1312>
- Khoirunnisa, R., & Ghozali, M. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Abu Ubaid. *Ekonomi Islam*, 9(2), 197–210.

- Laster Pirtle, W. N. (2020). Racial Capitalism: A Fundamental Cause of Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic Inequities in the United States. *Health Education and Behavior*, 47(4), 504–508. <https://doi.org/10.1177/1090198120922942>
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Sandikci, Ö. (2011). Researching Islamic marketing: Past and future perspectives. *Journal of Islamic Marketing*, 2(3), 246–258. <https://doi.org/10.1108/17590831111164778>
- Sandikci, Ö. (2018). Religion and the marketplace: constructing the 'new' Muslim consumer. *Religion*, 48(3), 453–473. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2018.1482612>
- Santosa, P. W. (2021). Macroeconomic indicators and yield curve of indonesian government bond. *Business, Management and Economics Engineering*, 19(1), 34–48. <https://doi.org/10.3846/bmee.2021.13167>
- Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, 16(01), 131. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341>
- Syahputra, R. (2019). STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN PROF. MUHAMMAD ABDUL MANNAN, M.A., Ph.D Telaah Terhadap Buku “Islamic Economics; Theory and Practice.” *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 2(2), 93–111. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v2i2.712>
- Utomo, Y. T. (2025). *Metodologi Ekonomi Islam Kontemporer* (A. Masruroh (ed.); Pertama). Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/620369/metodologi-ekonomi-islam-kontemporer>
- Utomo, Y. T., & Annisa Salsabila. (2017). Pengaruh upah minimum, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan kota, terhadap index pembangunan kota diy. *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(11), 951–952.

Utomo, Y. T., & Baratullah, B. M. (2022). ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN : Fokus Kajian Ekonomi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2).

Venkatesh, H., & Hiremath, G. S. (2021). The resurgence of currency mismatches: Emerging market economies are not out of the woods yet? *International Economics and Economic Policy*, 18(4), 721–742. [https://doi.org/10.1007/s10368-021-00500-](https://doi.org/10.1007/s10368-021-00500-x)

x